

**TERCAPAINYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN  
BAGI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN**

**SELATAN**

Nurul Hidayah

NPP 31.0693

*Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [ndiah2001@gmail.com](mailto:ndiah2001@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The National Unity and Political Agency for Tanah Laut Regency has the same duties and authority as other areas of government, especially in matters relating to creating a democratic state. Meanwhile, one of the potential supporters of democracy is the involvement of women in the political arena. The role of women in the political arena, especially in Tanah Laut Regency, is still less than 30%, so it is a problem in itself, especially in Tanah Laut Regency.* **Purpose:** *This research aims to find out how the Tanah Laut Regency National and Political Unity Agency provides political education to increase women's political participation in Tanah Laut Regency by the National and Political Unity Agency* **Method:** *This research uses Kartini Kartono's theory about political education. The design of this research is qualitative research with descriptive methods. The data collection technique in this research is by conducting interviews and documentation.* **Result:** *The results of this research indicate that Bakesbangpol Tanah Laut Regency has actively implemented political education programs to strengthen women's political participation. The program involves various activities such as training, outreach and interactive dialogue, and involves collaboration with various related parties.* **Conclusion:** *Apart from that, the research also identified the obstacles faced, such as large areas, inadequate human resources and budget limitations. However, Kesbangpol continues to strive to maximize its programs to increase women's political participation in the area.*

**Keywords:** *National Unity and Political Body, Political Education, Political Participation.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Tanah Laut memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan bidang pemerintahan lainnya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan mewujudkan negara yang demokrasi. Sementara itu salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Peran perempuan dalam kancah perpolitikan khususnya di Kabupaten Tanah Laut masih kurang dari 30%

sehingga menjadi permasalahan tersendiri khususnya di Kabupaten Tanah Laut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan di Kabupaten Tanah Laut oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Kartini Kartono tentang pendidikan politik. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah aktif melaksanakan program pendidikan politik untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Program tersebut melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, dan dialog interaktif, serta melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, seperti wilayah yang luas, sumber daya manusia yang kurang memadai dan keterbatasan anggaran. **Kesimpulan:** Namun, Kesbangpol terus berupaya memaksimalkan program-programnya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di daerah tersebut. **Kata kunci:** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan Politik, Partisipasi Politik.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya (Rahman, 2018). Pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi (Hasyim, Sartibi, dan Fauzan, 2020). Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Dalam realitas politik dewasa ini di Indonesia persoalan eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan adalah hal yang penting. Politik dinormakan secara luas untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya. Terlebih lagi di dalam sistem demokrasi yang berkembang di banyak negara saat ini, termasuk Indonesia. Demokrasi mengutamakan terwujudkannya kekuasaan di tangan rakyat, persoalan struktural yang kita temui ketika bicara kekuasaan rakyat adalah fakta bahwa tetap ada relasi kuasa yang tidak setara diantara unsur-unsur sosial yang ada. Proses politik seolah memiliki dinding besar yang menghalangi keterlibatan perempuan untuk masuk di dalamnya. Dinding besar itu diantaranya adalah nilai-nilai patriarki di dalam wujud budaya dan agama, hambatan berlapis (*multi-burden*) perempuan di dalam ruang privat dan publik, dan lainnya.

Indonesia sebagai negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, pada pemilu 2014 memiliki 17% perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif di DPR RI. Itu adalah porsi yang meningkat dramatis dibandingkan periode terdahulu pada saat pemilu 2009. Suatu kemajuan yang dihasilkan dari suatu gerakan menuntut diterapkannya politik afirmatif terhadap perempuan pada praktek demokrasi elektoral kita. Keterwakilan di

lembaga politik adalah satu dimensi dari politik perempuan yang penting untuk terus diperhatikan dan diperjuangkan perbaikannya (Ardiansa, 2017). Lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menetapkan aturan kuota 30% bagi perempuan sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Namun ternyata, penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan partai politik tidak secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Karena terbukti bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik masih sangat rendah, bahkan meskipun telah ditetapkan kebijakan kuota 30%. (Raqim, Lestari, dan Handoyo, 2017).

Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang dilakukan. Namun pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita (ibu) dengan peran politiknya. (Soeharto, 2011).

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal, hanya mencapai rata-rata 25%, sementara Undang-Undang menetapkan kuota minimal 30%. Peran perempuan dalam kancah perpolitikan di daerah ini masih kurang dari yang diharapkan, menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan, namun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa program pendidikan politik yang dilaksanakan perlu diperluas dan ditingkatkan efektivitasnya. Selain itu, meskipun kerjasama dengan instansi lain diharapkan dapat mensukseskan program ini, belum ada data spesifik tentang sejauh mana kerjasama ini telah berjalan atau dampaknya terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi perempuan juga belum sepenuhnya efektif, terlihat dari partisipasi perempuan yang masih di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Untuk mencapai target keterwakilan yang diharapkan, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang ada, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, dan langkah-langkah lebih lanjut yang memastikan partisipasi politik perempuan bisa meningkat dan mencapai kuota yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian oleh Ella Syahputri yang berjudul Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan (Ella Syahputri, 2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia dan Korea sama-sama dihambat oleh budaya yang patriarkis dan sistem rekrutmen partai politik yang ruhnya adalah memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan untuk urusan berpolitik. Penelitian oleh Novi Yanthy Adelina yang berjudul Keterwakilan

Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 (Novi Yanthy Adelina, 2016) hasil penelitian menjelaskan bahwa Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Penelitian oleh Oktaviani Adhi Suciptaningrum yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal (Suciptaningrum, 2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya keterwakilan kuota 30% anggota legislatif Perempuan Kabupaten Kendal. Penelitian oleh Audra Jovani dengan judul Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014 (Jovani, 2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan NTT di lembaga legislatif patut diapresiasi, di mana jumlah perempuan mengalami peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2014. Penelitian oleh Maria Dewi Rahmatya dengan judul Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya dalam Dunia Politik Analisis (Rahmatya, 2012) menjelaskan mengenai perspektif politisi perempuan berbasis islam dalam terjun ke dunia politik masih rendah.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kuota 30% calon legislatif perempuan di Gresik pada pemilu 2014 yang mana lokasi dari penelitian berbeda dari penelitian Alif Hidayati, 2014. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori tujuan pendidikan politik oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Tanah Laut.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang mana data dalam penelitian menggunakan subjek dari data yang diperoleh. Penulis menentukan informan dengan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kepala Bidang Politik, Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran, Ketua KPU, Caleg DPR RI, dan masyarakat terdiri dari mahasiswa dan tokoh masyarakat yang berhubungan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara dalam menganalisis data

yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yakni teori (Kartono, 1996) menggunakan pengukuran dua dimensi yakni membuat rakyat, dan memperhatikan mengupayakan.

#### **3.1 Membuat Rakyat**

Pendidikan politik bagi kaum Perempuan adalah proses yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar ilmu politik, termasuk definisi dan tujuan ilmu politik, manfaat politik, teori politik, serta pentingnya partisipasi politik. Melalui pendidikan politik, kaum perempuan diharapkan dapat memahami pentingnya keterlibatan dalam kegiatan politik, memahami kebijakan politik, dan meyakini bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik itu penting. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan tetapi diberikan kepada seseorang yang telah dipilih melalui suatu ajang pemilihan (Labolo & Ilham, 2015).

##### **3.1.1 Tujuan dan Wewenang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah aktif menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pendidikan politik dan sosialisasi kepada perempuan serta masyarakat umum, serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, telah dilaksanakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah mengambil langkah tepat untuk memperkuat partisipasi politik perempuan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Hal ini sejalan dengan pendapat (John & Mary Miner dalam Moekijat, 1998), menyatakan bahwa: “tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

##### **3.1.2 Koordinasi Antar Instansi**

Koordinasi dalam pendidikan politik adalah proses integrasi tujuan berbagai pihak, seperti KPU, DPRD, partai politik, dan tokoh masyarakat, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi melibatkan berbagai instansi untuk menyampaikan informasi yang jelas dan konsisten guna menghindari kesalahan interpretasi. Dalam pendidikan politik bagi perempuan, kerja sama dengan instansi lain sangat diperlukan. Dengan demikian, kerjasama antara KPU, Bakesbangpol, dan DPRD merupakan langkah strategis dalam memperkuat partisipasi politik perempuan serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat, membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Hal ini sependapat dengan Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

##### **3.1.3 Harapan Masyarakat Terhadap Pendidikan Politik**

Dalam indikator ini harapan masyarakat diperjelas dari penilaian masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat berpendapat bahwa pendidikan politik perempuan yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol

Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi sarana efektif dalam memberdayakan kaum perempuan secara politik, dengan menyediakan informasi yang relevan dan keterampilan yang diperlukan untuk keterlibatan aktif dalam proses politik. Hal ini sependapat dengan Pramita (2008) yang mengartikan harapan merupakan sesuatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan

### **3.2 Memperhatikan dan Mengupayakan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bertujuan untuk memberikan perhatian dan mendukung pengembangan kaum perempuan dengan memperluas dan meningkatkan potensi mereka dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilan, guna memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam proses politik.

#### **3.2.1 Hasil Aktual Pelaksanaan Pendidikan Politik**

Hasil aktual pelaksanaan pendidikan politik menjadi indikator yang menggambarkan realitas dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Namun, terkadang hasil tersebut belum mencapai ekspektasi yang diharapkan karena berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pendidikan politik. Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah menjalankan programnya namun belum maksimal sebagai pelaksana kegiatan pendidikan politik bagi perempuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil aktual yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut antara lain memberikan sosialisasi pendidikan politik pada kaum perempuan adalah sebuah perjalanan menuju kesadaran dan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bastian dalam Tangkilisan (2005) menyatakan bahwa “sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut”. Di tengah arus dinamika politik yang mengalir, perempuan memegang peran penting sebagai agen perubahan yang merajut jalinan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Namun, seringkali akses perempuan terhadap dunia politik masih terbatas, terhalang oleh stereotip dan hambatan-hambatan.

#### **3.2.2 Dampak yang dirasakan**

Dampak yang dirasakan merupakan indikator untuk melihat hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan dan dampaknya terhadap sasaran dari program tersebut. Kegiatan pendidikan politik oleh Bakesbangpol sudah dirasakan dampaknya namun belum menyeluruh. Sehingga kegiatan yang dijalankan Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik dapat terbilang nyata namun belum berjalan maksimal. Bakesbangpol telah melaksanakan kewajibannya namun belum berjalan maksimal. Hal ini sependapat dengan Gorys Kerap dalam Soemarwoto (1998) yang menyatakan bahwa “pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

#### **3.2.3 Cara Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam Menginternalisasikan Pendidikan Politik**

Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut menginternalisasikan pendidikan politik melalui sosialisasi yang materinya menyoroti isu-isu terkini yang akan membantu kaum perempuan merasa terhubung secara emosional dan personal serta agar mudah memahami materi pendidikan politik yang diberikan. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan melalui pendidikan politik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bakesbangpol menciptakan program dan kegiatan khusus untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi politik kaum perempuan, meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sejalan dengan pendapat Peter L. Berger dalam Munir (2013) yang menyatakan bahwa “Internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas atau konsep-konsep ajaran ke dalam diri individu”. Dalam konteks pendidikan politik, internalisasi melibatkan pemahaman dan penerimaan nilai-nilai demokrasi, hak-hak politik, dan keterlibatan dalam proses politik sebagai bagian dari identitas dan perilaku individu.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian mengenai tercapainya pendidikan politik bagi perempuan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa upaya Bakesbangpol berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan, meskipun peningkatan pengetahuan politik tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wanma (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan politik tidak secara signifikan mempengaruhi peningkatan pengetahuan politik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan politik berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat, terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam pemilihan selama pelaksanaan pendidikan politik, yang sesuai dengan temuan Anggraeni (2022) tentang dampak positif pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan politik oleh Bakesbangpol kurang menjangkau masyarakat luas di Kabupaten Tanah Laut, sehingga perlu adanya kerjasama yang lebih baik antar instansi.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dari beberapa temuan yang penulis tuangkan dalam penelitian tersebut, penulis juga menemukan temuan baru yakni evaluasi terhadap berbagai metode pendidikan politik yang digunakan, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, mencakup analisis mendalam mengenai efektivitas masing-masing metode dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman politik perempuan. Penelitian ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keterlibatan peserta, kualitas materi yang disampaikan, interaktivitas, dan dampak jangka panjang dari setiap metode. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi metode mana yang paling berhasil dalam mendorong perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik serta memperdalam pengetahuan mereka tentang hak dan tanggung jawab politik. Evaluasi ini juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti budaya dan tingkat pendidikan, untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis bagi pengembangan program pendidikan politik di masa mendatang.

## **IV . KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkesinambungan melalui metode tatap muka langsung, sehingga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Tujuan utama dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pegawai profesional dan berkompeten yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara faktor eksternal mencakup gangguan cuaca, luasnya wilayah Kabupaten Tanah Laut, dan tidak meratanya infrastruktur di daerah tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berupaya menggandeng instansi lain dalam melaksanakan pendidikan politik, seperti KPU, DPRD, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Tanah Laut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa, Dirga. "Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2017): 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Bin Hasyim, Nurbudiwati Sartibi, and Hasbi Shiddiq Fauzan, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Budaya Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 1–6, [www.lanmas.fisip.uniga.ac.id](http://www.lanmas.fisip.uniga.ac.id).
- Ella Syafputri. (2014) Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. MANAJEMEN: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : PT Aksara
- Hidayati, Alif. IMPLEMENTASI KUOTA 30% CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI GRESIK PADA PEMILU TAHUN 2014
- Jovani, Audra. (2018). Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT Pada Pemilu 2014
- Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandung : Mandar Maju, 1996., 1996.
- Labolo,M., & Ilham,T. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia :Teori, Konsep dan Isu Strategis. In 9 Februari.



- Maria Dewi Rahmatya, "Kiprah Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Surabaya Dalam Dunia. Politik Analisis Fenomena," Jurnal.unair.ac.id.
- Munir, Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam.Mencari Model Alternative Bagi Konstruksi Keilmuan Islam
- Moekijat. (1998) Asas-asas Perilaku Organisasi, Bandung : Alumni
- Novi Yanthy Adelina. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. Vol 1-12, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Oktaviani Adhi Suciptaningsih, 2020. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga. Legislatif di Kabupaten Kendal. Jurnal Komunitas 2
- Pramita, Agita. 2008. Harapan (Hope) pada Remaja Penyandang Thalassaemia Mayor. (Skripsi). Universitas Indonesia
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 44. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8385>.
- Raqim, Lestari, and Handoyo. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga." *Unnes Political Science Journal* 1, no. 1 (2017): 90–97. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsi/article/view/20078>.
- Soeharto, Achmad. "URGensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Muwazah*, no. Vol 3 No 1 (2011) (2011). <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/7/832>.
- Soemarwoto, Otto. 1998. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Syafputri, Ella. (2014) Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan
- Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo